

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	Persentase	30%	3%	3%	100%
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i>					
2.1	Indikator 2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	Persentase	90%	0%	0%	0%
2.2	Indikator 2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	90%	20%	25%	125%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	Persentase	90%	10%	10%	100%

3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	Persentase	85%	20%	20%	100%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	Persentase	85%	20%	20%	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Indeks	3 dari 4	3,5	3	116%
IV	Sasaran Program 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Persentase	92%	25%	25%	100%

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dukungan pada Tahapan Akses Indonesia ke OECD, ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD
Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses review dari Komite OECD

Latar Belakang

Persentase Dokumen Initial Memorandum yang Selesai Proses Review dari Komite OECD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koordinasi dan pengawalan proses akses Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), khususnya pada tahapan evaluasi substansi oleh Komite OECD. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia berhasil melalui proses review teknis dan substantif oleh Komite OECD sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku dalam proses akses.

Dalam kerangka akses OECD, Initial Memorandum merupakan dokumen penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan instrumen hukum OECD yang relevan. Dokumen ini menjadi dasar bagi Komite OECD untuk melakukan review awal, mengidentifikasi area keselarasan maupun kesenjangan kebijakan, serta merumuskan pertanyaan klarifikasi, catatan, dan rekomendasi awal kepada negara aksionis.

Proses review oleh Komite OECD mencakup pembahasan mendalam atas substansi Initial Memorandum melalui kajian dokumen, pertukaran pertanyaan dan jawaban (question and answer process), serta diskusi teknis antara Komite OECD dan Pemerintah Indonesia. Dalam tahapan ini, Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang difasilitasi oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Tim Nasional OECD, bertanggung jawab untuk menyiapkan klarifikasi, penjelasan tambahan, dan penajaman posisi kebijakan guna mendukung kelancaran proses review.

Pelaksanaan indikator ini berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD yang menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 tentang struktur pelaksana Tim Nasional OECD dan pembagian bidang kerja sesuai Peta Jalan Akses Indonesia. Dalam struktur tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD berperan mengoordinasikan respons pemerintah terhadap proses review Komite OECD, memastikan konsistensi narasi kebijakan, serta memantau progres penyelesaian review pada masing-masing bidang Tim Nasional OECD.

Persentase capaian indikator ini dihitung berdasarkan tingkat progres penyelesaian substansi dokumen Initial Memorandum dalam proses review oleh Komite OECD dibandingkan dengan total target penyelesaian dokumen pada periode pengukuran. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, kesiapan substansi kebijakan nasional, serta kemampuan Pemerintah Indonesia dalam merespons standar dan ekspektasi OECD sebagai bagian dari tahapan kunci menuju keanggotaan OECD.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Progres Penyelesaian Reviu Initial Memorandum}}{\text{Total Keseluruhan Proses Reviu Initial Memorandum}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 30%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target untuk Triwulan I sebesar 3% ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian proses reviu dokumen Initial Memorandum oleh Komite OECD sebagai bagian penting dari tahapan awal akses Indonesia ke keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menyiapkan dan menyampaikan klarifikasi, penjelasan tambahan, serta respons kebijakan atas catatan dan pertanyaan Komite OECD terhadap Initial Memorandum yang telah disampaikan. Pencapaian indikator ini menunjukkan kesiapan substansi kebijakan dan regulasi nasional serta konsistensi posisi Pemerintah Indonesia dalam memenuhi standar dan mekanisme evaluasi OECD sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 3% dari target Tahun 2026 sebesar 30% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD	Persen	3%	3%	100 % (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan I adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan	Terlaksana	- Kementerian Lingkungan Hidup

	Fact Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Lingkungan Hidup		selaku penanggung jawab bidang telah menyampaikan kuesioner yang berisi hal-hal teknis yang memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut kepada OECD, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fact-finding mission oleh OECD pada bidang Environment Policy dan Waste Management. - National Action Plan yang berisikan rencana penyesuaian kebijakan dan regulasi berdasarkan masukan dari OECD yang diperoleh dari pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan akan disampaikan kepada Environment Policy Committee (EPOC) OECD di Paris pada April 2026.
2.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Ekonomi Digital	Terlaksana	- Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyelesaikan dan menyampaikan seluruh tahapan Kuisisioner Committee on Digital Economy Policy (CDEP) kepada Sekretariat OECD pada tanggal 23 Januari 2026 (Kuisisioner Bagian I) dan tanggal 6 Februari (Kuisisioner Bagian II).
3.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission,	Terlaksana	- OECD telah menyampaikan kuesioner bidang Fiscal Affairs pada Desember

	dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Fiskal		2025. Selanjutnya, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab bidang telah menyampaikan tanggapan atas kuesioner tersebut kepada OECD pada 26 Maret 2026.
4.	Koordinasi Penyiapan Kuesioner, Pelaksanaan Fact-Finding Mission, dan/atau Penyusunan National Action Plan Bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor	Terlaksana	- Sekretariat Tim Nasional OECD telah melakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner bidang Trade dan Export Credit. - Kuisisioner disampaikan kepada OECD pada tanggal 30 maret 2026 oleh Kementerian Perdagangan selaku peanggung jawab bidang.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pada 3-6 Februari 2026, Tim Economic Survey OECD melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan fact-finding mission dalam rangka penyusunan Indonesia Economic Survey 2026. Substansi pembahasan Indonesia Economic Survey 2026:
 - Macroeconomic Development and New Source of Growth;
 - Agri-food Security and Resilience, including Subsidy Reform and Climate-change Adaptation;
 - Health Policies, Economic Impact and Fiscal Sustainability Against the Background of Population Ageing; dan
 - Global Value Chain, Industrial Upgrading and Economic Security.
2. Telah dihadiri lokakarya di bidang pendidikan dan keahlian (education and skills) yang merupakan kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Komite Pendidikan OECD pada 23 Februari 2026. OECD merekomendasikan agar Indonesia mengikuti program OECD Indicators of Education Systems (INES) untuk mendukung proses aksesi. INES menyediakan data komprehensif tentang struktur, keuangan, dan kinerja sistem pendidikan, yang diterbitkan setiap tahun dalam laporan Education at a Glance. Indikator utama INES akan mengukur hasil belajar

siswa, akses dan partisipasi, investasi keuangan, dan kondisi kerja guru di Indonesia.

3. Pada 25 Februari 2026, Kedutaan Besar Inggris menyelenggarakan OECD Accession Roundtable dan Peluncuran Economic Growth Partnership (EGP). Kegiatan ini memanfaatkan kunjungan UK Minister for the Indo-Pacific, Minister Seema Malhotra, dengan melibatkan Sekretariat Tim Nasional OECD, Kantor OECD Jakarta, dan pelaku usaha.
 - OECD Accession Roundtable berfokus pada bagaimana private sector dapat terinformasi ekspektasi dari manfaat dan implikasi proses akses OECD, khususnya pada sektor Clean Energy Investment.
 - Pemerintah Inggris akan memberikan dukungan kepada Pemri dalam lingkup green enabling framework, jaringan listrik (super grid), dan dukungan proses penyelarasan dengan OECD environmental standards.
 - Untuk sektor energi – ketenagalistrikan, Power Purchase Agreement (PPA) merupakan kunci utama untuk mendorong realisasi investasi. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kapasitas 100 GW. Indonesia dirasa perlu melakukan inovasi dalam skema bisnis untuk meningkatkan minat investor.
4. Sekretariat Tim Nasional OECD telah melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait akses OECD Indonesia, antara lain:
 - a. Pertemuan dengan International Budget Partnership (IBP). IBP adalah lembaga non-pemerintah yang berfokus pada penguatan manajemen keuangan publik. Salah satu program IBP di Indonesia, yaitu Open Budget Survey bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. IBP Indonesia telah menyusun policy brief mengenai kajian awal kesiapan Indonesia dalam reformasi tata kelola keuangan publik khususnya terkait dengan anggaran negara.
 - b. Pertemuan dengan Koalisi CSO (INFID, The PRAKARSA, Publish What You Pay, IBP, dan Migrant Care). Ditekankan perlunya konsistensi implementasi regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia di bidang yang menjadi perhatian Koalisi CSO, antara lain: Public Governance, Anti-Bribery, dan Regulatory Policy Committee. CSO akan dapat memberikan dukungan sesuai dengan keahlian/fokus masing-masing asosiasi/organisasi untuk akses OECD.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan Sekretariat OECD serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya menggunakan fasilitas ruang rapat kantor sehingga proyeksi efisiensi yang

dilakukan adalah sebesar Rp43.560.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pertemuan yang akan dilakukan pada TW II-IV.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi,

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20
2. Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20

Latar Belakang

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, mengendalikan kebijakan, serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 yang menghasilkan komitmen untuk diadopsi oleh negara anggota G20, serta mendorong pencapaian kepentingan strategis Indonesia di tingkat global. Dalam hal salah satu komitmen tidak dapat dicapai karena alasan di luar kendali, maka capaian dapat digantikan oleh komitmen lain yang relevan dan sepadan dalam kerangka kerja yang sama.

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati pada Leaders' Declaration dan/atau forum-forum yang berada di bawah Sherpa Track G20, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi multilateral yang mendukung program prioritas nasional. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan internasional, fasilitasi investasi lintas negara, dukungan pembiayaan inklusif, ketahanan rantai pasok global, transformasi digital yang adil dan merata, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta inisiatif transisi energi yang berlandaskan prinsip keadilan iklim.

Komitmen yang dimaksud dapat mencakup Leaders' Declaration, Communiqué, Chair's Summary, Joint Declaration, Deliverables konkret lintas sektor, inisiatif kerja sama tematik, atau program lanjutan yang diperoleh melalui rangkaian pertemuan pada Sherpa Track G20 baik dalam bentuk Pertemuan Tingkat Menteri (PTM), Working Groups, Engagement Groups, maupun pertemuan antar pejabat tinggi dan kementerian/lembaga terkait. Kesepakatan ini difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan K/L teknis dan perwakilan Indonesia di forum internasional, dengan tujuan akhir

mendukung kepentingan pembangunan nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.

Komponen ini dibobotkan sebesar 100% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi multilateral dalam forum Sherpa G20 merupakan tugas dan fungsi pokok dari Asdep KSE Multilateral.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam Forum Sherpa G20 Tahun 2026 sebesar 5 Komitmen, yang merupakan komitmen, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- 1. Leaders' Declaration
- 2. Energy Abundance Working Group's Outcomes
- 3. Innovation Working Group's Outcomes
- 4. Trade Working Group's Outcomes, dan
- 5. Business 20 Communique

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Jumlah\ Komitmen}{Target\ Komitmen\ (5)} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan I, yaitu sebesar 0%,dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20	Persentase	0%	0%	0%

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20 sudah tercapai sesuai target IKU yang ditetapkan pada Triwulan I, yaitu 0%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Multilateral melalui Jumlah Komitmen Forum Sherpa G20

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Internal Posisi Indonesia pada Perundingan Sherpa G20	Terlaksana	Telah dilaksanakan Koordinasi Internal terkait prioritas presidensi Amerika Serikat berdasarkan hasil Pertemuan Sherpa 1 Presidensi Amerika Serikat 2026 yang dilaksanakan pada 15-16 Desember 2025.
2.	Bahasan Posisi Nasional untuk isu-isu prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat	Terlaksana	Audiensi Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi/Sherpa G20 Indonesia dengan Focal Point Working Group on Energy Abundance/Kementerian Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral mendiskusikan posisi Pemri, terutama sektor energi dan mineral dalam Presidensi G20 Amerika Serikat Tahun 2026.
3.	Jaring masukan posisi awal negara G20 pada prioritas Presidensi AS 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan informasi awal mengenai posisi negara-negara anggota G20 terhadap isu-isu prioritas Presidensi Amerika Serikat Tahun 2026 melalui

			komunikasi awal dengan kementerian/lembaga terkait.
4.	Rangkaian Perundingan Posisi Energy Abundance Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group.	Terlaksana	Delegasi Indonesia telah berpartisipasi dalam rangkaian perundingan Energy Working Group, Innovation Working Group, dan Trade Working Group. Pertemuan Energy Working Group dilaksanakan pada 29 Januari dan 23 Februari 2026, Innovation Working Group pada 4 Februari dan 5 Maret 2026, serta Trade Working Group pada 29 Januari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa Jepang pada tanggal 27 Februari 2026
2. Audiensi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian ESDM yang merupakan focal point di Working Group on Energy untuk membahas prioritas kepentingan Indonesia.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya Menghadiri Pertemuan Working Group secara virtual dan menghadiri rapat-rapat yang melalui *teleconference*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp23.210.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk menghadiri Pertemuan Sherpa G20 ke-3, ke-4 dan KTT Pada Triwulan II s.d. Triwulan IV.

2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero

Latar Belakang

IKU ini mengukur tingkat efektivitas komitmen terkait implementasi proyek kerja sama ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang mencerminkan upaya untuk mewujudkan kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang efektif, melalui penerjemahan kesepakatan

**Emission
Community (AZEC)**

internasional ke dalam bentuk proyek konkret yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi hijau, serta percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Fokus utama dari pengukuran ini adalah pada dua inisiatif strategis, yaitu Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC), yang menjadi bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral di bidang lingkungan dan energi. Kedua skema ini diharapkan menghasilkan komitmen proyek yang terkoordinasi dengan baik, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, dan memiliki kontribusi terhadap target pembangunan rendah karbon.

Target Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) adalah berupa 5 komitmen, 5 komitmen resmi, yang berasal dari implementasi JCM dan AZEC, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Hasil Pertemuan Expert Group (EG) dari Asia Zero Emission Community (AZEC);
2. Keputusan Komite Bersama/Joint Committee Joint Crediting Mechanism (JCM) perihal registrasi, metodologi, dan issuance proyek; Komitmen bersama yang dihasilkan dalam AZEC Ministerial Meeting;
3. Joint Declaration Asia Zero Emission Community (AZEC) Leaders' Meeting;
4. Chairs' Statement dari AZEC Plus Summit on Energy Resilience.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Implementasi Proyek JCM dan AZEC}}{\text{Total Implementasi Proyek JCM dan AZEC}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada Forum Sherpa G20 telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan I, yaitu sebesar 20%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 <i>Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia</i>	Persentase	20%	25%	125% (Memuaskan)

Zero Emission Community (AZEC)				
--------------------------------	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Tingkat Efektivitas Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Implementasi JCM melalui Global Partnership Meeting (GPM)	Terlaksana	➤ Delegasi Kemenko Perekonomian telah menghadiri JCM Global Partnership Meeting (GPM) yang berlangsung pada tanggal 2-5 Februari 2026 di Tokyo, Jepang sebagai pertemuan tahunan yang diikuti oleh negara mitra JCM untuk membahas implementasi JCM. ➤ Tindak lanjut yang diprioritaskan dalam pertemuan adalah sebagai berikut: - Koordinasi lintas kementerian sektor untuk mempercepat implementasi MRA terutama atas 26 proyek JCM terkait perlu dilanjutkan dengan KLH dan K/L terkait - Melanjutkan diskusi forestry guidelines dengan pihak Jepang dan Kementerian Kehutanan

			- Sebagai bagian dari transparansi dalam kerangka Perjanjian Paris, perlu dilakukan penyesuaian Initial Report pasca Perpres 110/2025
2.	Koordinasi Pelaksanaan 9th AZEC Expert Group Meeting	Terlaksana	Kemenko Perekonomian, K/L terkait, dan pihak-pihak terkait telah melaksanakan beberapa pertemuan sebagai bentuk monitoring dan identifikasi terhadap potensi proyek yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
3.	Pelaksanaan 9th AZEC Expert Group Meeting	Terlaksana	→ Delegasi Kemenko Perekonomian telah menghadiri Pertemuan AZEC-EGM ke-9 di Tokyo, Jepang pada 26 Januari 2026. → AZEC-EGM adalah <i>platform</i> untuk <i>debottlenecking</i> dan percepatan implementasi proyek di bawah skema AZEC di Indonesia. Beberapa proyek yang menunjukkan progres konkret, antara lain PLTSA Legok Nangka dan PLTP Hululais. Proyek lainnya yang dibahas adalah PLTP Sarulla, Transmisi Listrik Jawa-Sumatera, <i>Green Ammonia Initiative from Aceh</i>, dan proposal studi untuk <i>Template</i> PPA pada sektor pembangkit panas bumi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif Adjustment PLTP Sarulla pada tanggal 27 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM.
2. Menghadiri Rapat Pembahasan Penyelesaian Isu PLTP Sarulla pada tanggal 17 Maret 2026 di Kementerian ESDM.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom dan pemanfaatan ruang rapat di kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp15.700.000.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses revidi dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan pada Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

3.1 Persentase

Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses revidi dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Penyelesaian Dokumen Initial Memorandum dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD telah memenuhi target TW 1 sebesar 10% atau 11% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 90%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD dalam rangka akses Indonesia ke OECD	Persentase	10%	10%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Dokumen Initial Memorandum yang direviu dari komite OECD			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen	Terlaksana	Kemenko Perekonomian

	data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang bidang Lingkungan Hidup		selaku Sekretariat Tim Nasional OECD telah melakukan pendampingan dan monitoring pada rangkaian Rapat Koordinasi Pembahasan Kuisisioner Akses OECD bidang lingkungan hidup. Settimnas juga turut hadir pada Pertemuan OECD Accession Mission bidang Lingkungan Hidup dan membantu melakukan pemetaan atau identifikasi K/L sesuai dengan substansi yang dibahas dalam accession mission serta membantu fasilitasi interpretasi substansi kuisisioner.
2.	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang bidang Ekonomi Digital	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi untuk mengidentifikasi gap dan menentukan prioritas bidang ekonomi digital yang mencakup pemerataan akses digital, penguatan tata kelola data, perlindungan data pribadi, tata kelola AI berbasis risiko, keamanan siber, perlindungan konsumen digital, serta pengelolaan

			internet yang terbuka dan aman.
3	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Kebijakan Fiskal	Terlaksana	Telah dilaksanakan proses konsolidasi dalam rangka mengoptimalkan dukungan proses asesmen akses, termasuk keterlibatan K/L lain pada bidang Fiscal Affairs.
4	Rapat koordinasi teknis pemenuhan elemen data, jawaban kuesioner, dan persiapan teknis kunjungan lapangan bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor	Terlaksana	Sehubungan dengan telah diterimanya Kuesioner Kredit Ekspor dari Sekretariat OECD, Kementerian Perdagangan selaku Koordinator Bidang telah melakukan persiapan teknis dalam pengisian kuisisioner yang mencakup dua elemen utama, yaitu: i) evaluasi terhadap kemampuan Indonesia untuk mengimplementasikan instrumen hukum substantif OECD dalam lingkup Working Party on Export Credit Guarantees atau Export Credit Groups/ECG; dan ii) evaluasi terhadap kebijakan dan praktik Indonesia dibandingkan dengan kebijakan dan praktik terbaik OECD di bidang kredit ekspor

			yang didukung pemerintah.
--	--	--	---------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. *Kick-Off Meeting* Pelaksanaan Tinjauan Teknis (*Technical Review*) bersama Sekretariat dan Komite OECD terkait.
2. Pada 4 Februari 2026 telah dilakukan peluncuran 'The Swiss OECD Technical Accession Support to Indonesia' dalam pertemuan Menko Perekonomian dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste dan ASEAN.
 - Lingkup dukungan berupa Capacity Building bagi K/L dalam proses akses dan Stakeholder Engagement untuk meningkatkan pemahaman terkait standar OECD.
 - Sektor dukungan: anti-bribery, State-Owned Enterprise reform, responsible business conduct, sustainable infrastructure development, public integrity and financial management, trade policy, dan value chain integration, termasuk tambahan untuk sektor sosial: health, education, dan employment/vokasi.
3. Pada 26 Februari 2026, dilaksanakan pertemuan antara Kemenko Perekonomian, Kedubes Australia, dan Prospera untuk membahas Evaluasi Program Prospera Fase 1 dan rencana pelaksanaan Fase 2. Dukungan terhadap proses akses OECD Indonesia merupakan salah satu hasil utama Fase 1 dalam pilar "Expanding Markets, Creating Jobs". Saat ini DFAT Australia masih menghimpun masukan dari K/L mengenai usulan dukungan yang diperlukan Pemri. Terkait akses OECD Indonesia, akan disampaikan usulan kepada DFAT dan Prospera mengenai bentuk dukungan yang diperlukan bagi Tim Nasional OECD.
4. Pada 11 Maret 2026, Sekretariat Tim Nasional OECD telah melakukan Pertemuan Koordinasi terkait Perkembangan Akses OECD Indonesia bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat OECD, beberapa catatan penting dalam pertemuan adalah:
 - OECD mengagendakan pertemuan untuk koordinasi dukungan terhadap akses Pemri pada 10 April 2026 secara daring. Kementerian Luar Negeri cq Pusat Strategi Kebijakan Multilateral telah menginisiasi kajian untuk mengidentifikasi dukungan konkret yang diperlukan kementerian/lembaga Anggota Tim Nasional OECD dalam pelaksanaan proses akses.
 - Pembahasan mengenai rencana kunjungan OECD Accession Coordinator, pada 1-2 April 2026 dengan agenda koordinasi dan monitoring proses akses Indonesia. Direncanakan pertemuan baik dengan unsur pimpinan Sekretariat Tim Nasional OECD, K/L Anggota Tim Nasional OECD, maupun unsur non-pemerintah seperti pelaku usaha, CSO, serikat pekerja, dan akademisi.
 - OECD memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan PMO OECD yang diharapkan dapat segera terbentuk, sehubungan dengan pelaksanaan proses akses dan koordinasi donor lebih lanjut

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp25.700.000.

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan, yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap beberapa sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait kerja sama ekonomi multilateral, antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Outcomes dari Rangkaian Pertemuan Sherpa G20 Amerika Serikat;
2. Outcomes dari Rangkaian Intersesi Sherpa G20 Amerika Serikat berupa Draft G20 Leaders' Declaration atau Dokumen Tingkat Pemimpin serupa yang dihasilkan oleh Presidensi G20 Amerika Serikat.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional telah memenuhi target TW 1 sebesar 20% atau 22% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 90%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pertemuan Sherpa Track G20 terhadap Pencapaian Hasil Strategis untuk Kepentingan Nasional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat Koordinasi Rapat Diseminasi Hasil Sherpa ke-1 G20 Presidensi Amerika Serikat	Terlaksana	Diseminasi Hasil Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026. Pada diseminasi tersebut disampaikan beberapa hal:

			Amerika Serikat akan berfokus pada isu ekonomi dan memastikan diskusi antara negara anggota sejalan dengan tujuan pendirian G20. Amerika Serikat juga berkomitmen memastikan Presidensi G20 AS <i>result driven</i> dengan mengupayakan kerja yang efektif dan berdampak. Presidensi AS hanya akan menyelenggarakan 4 (empat) <i>Working Group</i> (WG), 3 (tiga) WG pada <i>Sherpa Track</i> dan 1 (satu) WG pada <i>Finance Track</i>. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang kalkulatif dan komprehensif ditengah sikap Presidensi AS. Kepentingan ekonomi dan politik strategis Indonesia perlu tetap dijaga, baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah disampaikan Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja *Sherpa Track* Presidensi G20 Amerika Serikat Tahun 2026 kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh masukan. Penyusunan rancangan keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyederhanaan (*streamlining*) struktur *Sherpa Track* oleh Presidensi G20 Amerika Serikat yang hanya menyelenggarakan 3 (tiga) *working group*, serta penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur dan tata kelola pada beberapa kementerian/lembaga.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp7.700.000.

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)

Latar Belakang

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan berupa Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait, kalangan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada JCM dan AZEC diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu:

1. Perencanaan Kebijakan;
2. Implementasi Kebijakan;
3. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan;
4. Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sampai dengan laporan ini disusun, Tingkat Efektivitas Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) telah memenuhi target TW 1 sebesar 20% atau 23% jika dibandingkan dengan Target tahunan sebesar 85%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)				
---	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kesepakatan Pembangunan Harmonisasi Kebijakan Energi Bersih pada Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Melakukan penelaahan kesesuaian proyek JCM dengan regulasi dan kondisi Indonesia	Terlaksana	Sekretariat JCM telah melakukan penelaahan atas Keberlanjutan Mutual Recognition Agreement (MRA) dalam skema JCM setelah berlakunya Perpres 110/2025
2.	Koordinasi atas Implementasi Perpres 110/2025 dan SRUK untuk Proyek JCM	Terlaksana	Telah dilaksanakan audiensi dengan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan terkait Skema JCM di sektor kehutanan dan dampak terbitnya Perpres 110 tahun 2025. Dengan terbitnya Perpres 110/2025 sebagai kebijakan Indonesia yang relevan. Berikut beberapa hal yang didiskusikan: - Alokasi kredit karbon. Selama ini penerbitan dan alokasi kredit karbon diputuskan oleh Joint

			Committee melalui proses negosiasi bilateral. Perpres 110 mengatur bahwa alokasi diputuskan melalui proses pemberian masukan oleh Kementerian sektoral dan pembahasan lanjutan dengan KLH. - Penjelasan mengenai SRUK dan SRN/SPEI. Sebagai sebuah skema yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan target NDC, JCM harus dicatatkan dalam suatu sistem registri nasional dan mendapatkan otorisasi bagi kredit karbon yang menjadi bagian Jepang. Regulasi yang mengatur mengenai otorisasi saat ini hanya terdapat dalam Permen LHK No 21/2022 dimana mempersyaratkan bahwa otorisasi diberikan kepada SPEI yang seluruh aktivitas mitigasinya tercatat dalam SRN.
3.	Penguatan kualitas koordinasi awal dan penyelarasan pemahaman dengan Stakeholders AZEC	Terlaksana	PLTSa Legok Nangka merupakan salah satu proyek dibawah skema AZEC yang sedang dilakukan <i>debottlenecking</i> agar dapat dipercepat implementasinya. Pada 11 Februari 2026, diadakan Acara Penyampaian Komitmen dan Dukungan Internasional Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka yang dihadiri oleh KL terkait (Kemenko Perekonomian, ESDM, Kemenkeu), Perwakilan Jepang yang dihadiri Delegasi yang dipimpin Wamen LH Mr. Doi dan jajaran Kedubes Jepang, Perwakilan Belanda, PLN, dan jajaran Pemprov Jabar serta Jajaran Pemda Kab/Kota di 6 Kabupaten terkait. Dalam acara tersebut dilakukan penyampaian komitmen dari pihak internasional dan pihak 6 kab/kota ke Pemprov Jabar atas dukungan PLTSa Legok Nangka. Kemenko Perekonomian ikut menghadiri dan memberikan <i>opening remarks</i> pada acara tersebut.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Local Stakeholder Consultation 6MW hydro Power Plant Project di Sungai Besay, Lampung pada tanggal 12 Februari 2026
- JCM Consultation Meeting dengan Project Participant, yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) pada tanggal 11 Maret 2026

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyelenggaraan Rapat yang dilakukan melalui zoom dan menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp24.850.000.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Latar Belakang

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah item survey}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 (Baik) atas indeks. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 3 dari target Tahun 2026 sebesar Indeks 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral	Indeks	3 dari 4	3,5	116%

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral pada tahun 2026 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik dan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui rapat koordinasi. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Triwulan I sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kualitas layanan serta ketepatan waktu pelaksanaan	Terlaksana	Dalam rangka memperoleh penilaian atas pelaksanaan koordinasi pada TW I, telah dilakukan penyusunan kuesioner survei serta penyebaran tautan survei kepada para counterpart K/L dan stakeholders terkait lainnya.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Profesional

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Capaian Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan

disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
4. Penyusunan Renja 2026;
5. Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026;
6. Penyusunan Matriks Manajemen Risiko;
7. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi; dan
8. Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

$$\% \text{ Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% atas Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 25% dipilih mengacu kepada tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 23,53% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja	Persentase	25%	25%	100% (Memuaskan)

Sama Ekonomi Multilateral				
---------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan capaian kinerja TW 1 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka diprediksi realisasi dan capaian kinerja pada TW 2 dan selanjutnya di 2026 khususnya pada IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral diproyeksikan akan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang berjalan sesuai rencana, didukung dengan koordinasi internal yang efektif, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta komitmen seluruh unit kerja dalam memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada triwulan berikutnya diharapkan tetap berjalan sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Presentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Kerja Sama Ekonomi Multilateral			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU pada TW I 2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja TW I	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan

			Kinerja Triwulan I 2026 dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kinerja.
3.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral telah melakukan penyusunan Renja 2026
4.	Inisiasi optimalisasi implementasi Srikandi	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi untuk pemrosesan surat dan disposisi telah dilaksanakan selama Triwulan I

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat penyusunan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU baik secara internal di lingkungan Kedeputan maupun pembahasan secara langsung dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2. Menyusun Monitoring dan Evaluasi untuk Capaian Kegiatan dan Anggaran melalui E-Monev Bappenas setiap bulannya.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, menfurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI.

Jakarta, 10 April 2026

Plt Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Cahyadi Yudodahono